

**ROLE OF POLITICAL PARTY IN THE COMMUNITY TO PROVIDE EDUCATION POLITICS IN THE
DISTRICT OF GRESIK
(Studies on the Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa in Gresik)**

AYUB BUDI PRAYOGA
Tauran, S.Sos., M.Soc. Sc.,

ABSTRACT

In Act No. 2 of 2008 on political parties mention one of the functions of political parties is as a means of political education for members and the public to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in society, nation and state. This means that all political parties in Indonesia have an obligation to educate the whole society, with materials that have been provided for in Act No. 2 of 2008 on political parties.

This study aimed to describe the role of DPC PKB Gresik in providing political education to the people in Gresik regency, and the factors driving and inhibiting for political education. The method used is descriptive qualitative, data collection was done by observation, interview and documentation. Sources of data obtained from DPC PKB Gresik, Gresik regency legislators from the PKB faction, and the community.

The results showed that DPC PKB Gresik had done political education to the general public, however, given the political education is not maximized. There are several things that affect the political education so that political education was to be not optimal. The study recommends the need for change in providing political education to the people, good change of form of communication, material, or place settings and methods of implementation, in order to achieve the real goal of providing political education to the community.

Keyword : political parties, Partai Kebangkitan Bangsa, and politic education

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK
(Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)**

AYUB BUDI PRAYOGA
Tauran, S.Sos., M.Soc. Sc.,

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Gresik, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat selama melakukan pendidikan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik, ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik memang telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, namun demikian pendidikan politik yang diberikan belum maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendidikan politik sehingga pendidikan politik yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik perubahan bentuk komunikasi, materi, *setting* atau tempat pelaksanaan dan metode, guna tercapainya tujuan sebenarnya dari pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa dan Pendidikan Politik

I. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara. Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui pemilu.

Ramlan Surbakti (1992:116) mengatakan bahwa fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan adanya jaminan kebebasan setiap orang seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 membuat banyaknya partai politik yang muncul di Indonesia. Namun selain untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat (Budiarjo, 1986:163).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kader, dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun tujuan pendidikan politik (Kartini Kartono, 1996:68) yaitu:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):
 - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan & mengupayakan:
 - a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik,

demokrasi pembangunan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan politik juga nantinya berpengaruh penting pada hasil dari pemilu yang dilakukan. Ketika masyarakat semakin cerdas, tidak mudah diprovokasi, dan tidak terpengaruh pada pencitraan sesaat, selain itu juga masyarakat tidak mudah tergiur dengan *money politic* yang selalu terjadi dari masa ke masa, maka pemilu yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan seorang pemimpin terpilih yang berkualitas yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan partai politik didirikan. Fakta yang terjadi selama ini, setiap pemilu berlangsung sering terjadi masalah-masalah lama, mulai dari *money politic*, budaya *patron-klien*, banyaknya golput, bahkan benturan fisik antar pendukung atau simpatisan dari partai politik.

Fakta-fakta tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (2011) tentang "Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat" yang dilakukan pada 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa: intensitas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat kurang karena pendidikan politik yang dilakukan hanya pada masa reses atau pada masa kampanye menjelang pemilu. Tema pendidikan yang dilakukan parpol yaitu pendidikan pemilih dalam hal pemilu dan visi misi parpol, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan diarahkan untuk memilih partai

tersebut. Selain itu juga belum ada suatu model pendidikan politik yang partisipatif antara anggota masyarakat, konstituen, dan kader parpol, karena pendidikan yang dilakukan seringkali hanya sebagai sosialisasi visi misi parpol.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu partai politik besar dan penguasa yang ada di Kabupaten Gresik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang berkenaan dengan pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat

II. KAJIAN PUSTAKA PARTAI POLITIK

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan fungsi dari partai politik sebagai berikut:

Partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

PENDIDIKAN POLITIK

Dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik mendefinisikan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK

Adapun tujuan pendidikan politik (Kartini Kartono, 1996:68) yaitu:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):
 - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan

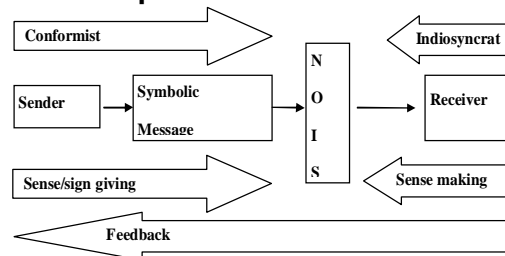
dan kesejahteraan hidup bersama.

2. Memperhatikan dan mengupayakan:
 - a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijaksanaan pemerintah (Firmanzah, 2011: 347).

Bagan 1 : Bagan proses komunikasi politik



Sumber : Firmanzah, 2011.

MATERI DAN METODE PENDIDIKAN POLITIK

Materi pendidikan politik yang dikemukakan oleh Firmanzah dibagi berdasarkan sasaran yang dituju. Sasaran pendidikan politik ada dua kelompok yakni masyarakat dan kader partai. Pertama, materi pendidikan politik yang untuk masyarakat adalah mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, konstitusi negara dan konstelasi politik terkini. Kedua, materi pendidikan politik yang ditujukan kepada kader lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir futuristik.

Senada dengan materi pendidikan politik, metode pendidikan politik juga membedakan antara pemberian pendidikan kepada pengurus dan kader partai politik dengan masyarakat. Metode pendidikan politik oleh partai politik kepada pengurus dan kadernya diberikan secara langsung (tatap muka) dan sifatnya doktrial. Sedangkan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (perantara) yang biasanya melalui media masa yang bisa digunakan partai sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (Firmanzah, 2011:80).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

Penggunaan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Moeloeong, 2004: 131). Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 22) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistik.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat di Kabupaten Gresik, dengan fokus sebagai berikut:

1. Konsep dan program partai politik tentang pendidikan politik.
2. Materi dan metode pendidikan politik yang digunakan.
3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Gresik meliputi:

1. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik,
2. Kantor DPC PKB Kabupaten Gresik,
3. Masyarakat Kabupaten Gresik.

Sedangkan waktu penelitian dilakukan antara bulan April 2013-Mei 2013.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut

Arikunto (2010: 21) agar penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder yang digolongkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Arikunto (2010: 22) data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Data primer tersebut terdiri dari:

- 1.1. Hasil wawancara terhadap pejabat DPRD Kabupaten Gresik.
- 1.2. Hasil wawancara terhadap DPC PKB Kabupaten Gresik.
- 1.3. Hasil wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Gresik yang telah memiliki hak pilih.
- 1.4. Pengamatan di lapangan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan politik yang diberikan Partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat Gresik.

2. Data Sekunder

Arikunto (2010: 22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 2.1. Dokumen-dokumen dari DPRD Kabupaten Gresik yang berhubungan dengan pendidikan politik oleh partai politik.
- 2.2. Dokumen-dokumen dari DPC PKB Kabupaten Gresik yang

berhubungan dengan pendidikan politik oleh partai politik.

- 2.3. Pemberitaan media masa mengenai kegiatan partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

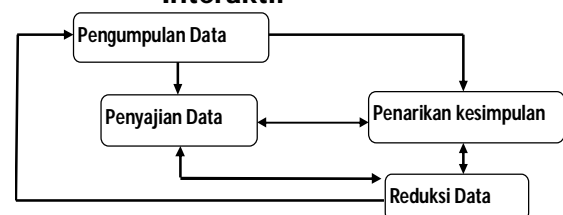
Dokumen-dokumen tersebut sangat mendukung sebagai data sekunder karena dokumen-dokumen tersebut sangat berhubungan dengan fokus dalam penelitian ini.

Instrumen utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Basrowi & Suwandi, 2008: 26). Dalam penelitian ini selain peneliti sendiri, juga digunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, kamera, *tape recorder*, dan lembar catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif sebagai teknik dalam analisis data, yang ditunjukkan pada bagan berikut:

Bagan 2: bagan analisis data model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari penelitian yang dilakukan, PKB telah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat di Kabupaten Gresik. Namun pendidikan yang dilakukan masih dalam kategori pendidikan pemilih dan sebatas menjual keunggulan partai untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pilihan dalam pemilu, bukan mencerdaskan dan membebaskan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan makna pendidikan politik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 31 menyebutkan bahwa:

- (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan pasal 31 tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi partai politik yang ada dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik selama ini juga belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, selain itu juga pendidikan politik yang dilakukan belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat Gresik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, hampir seluruh dari narasumber mengatakan alasan mereka mengikuti pemilu adalah karena hanya sebatas pada berpartisipasi semata, dan alasan memilih PKB hanya karena mereka dari keluarga NU sehingga mereka cenderung memilih PKB. Satu hal yang paling memprihatinkan adalah masyarakat memilih karena mereka telah menerima sejumlah uang untuk memilih salah satu calon yang mengikuti pemilu. Inilah fakta yang menunjukkan bahwa dari pendidikan politik yang telah dilakukan belum mampu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PKB dalam menyelenggarakan pendidikan politiknya, dilakukan melalui lembaga atau asosiasi dalam masyarakat yakni organisasi-organisasi NU, seperti IPNU, FATAYAT, ANSOR dan MUSLIMAT. Seperti yang dilakukan PKB pada tanggal 17 Mei 2013, waktu kegiatan MUSLIMAT di wilayah kecamatan Balongpanggang dengan mendatangkan Khofifah dan politisi PKB dalam rangka pemenangan PILGUB JATIM 2014 mendatang. Pola pendidikan yang dilakukan PKB memang sering dilakukan di banom-banom NU karena memang pada dasarnya PKB merupakan satu-satunya organisasi politik yang dilahirkan oleh NU. Selama ini NU sebagai organisasi yang melahirkan PKB serta memfasilitasi eksistensi PKB dan akan tetap mendukung PKB. Seperti pernyataan Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj yang menyatakan bahwa sampai saat ini PBNU tetap mendukung PKB, karena keputusan itu dihasilkan Muktamar NU di Lirboyo tahun 2000 lalu sampai sekarang belum berubah dan belum dicabut (diakses dari <http://dpp.pkb.or.id> yang diakses pada tanggal 30 April 2013).

Sikap NU yang mendukung PKB dan basis massa PKB mayoritas warga NU, hal tersebut tidak menjadikan NU sebagai organisasi sayap dari PKB karena kedudukan NU lebih tinggi daripada PKB. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rofiq, bahwa NU bukan organisasi sayap PKB, akan tetapi NU merupakan induk yang melahirkan PKB, yang menjadi organisasi sayap dari PKB adalah GEMA SABA (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa). PKB dan NU berdiri

sendiri-sendiri, masing-masing memiliki struktur tersendiri. Walaupun basis massa dari PKB mayoritas warga NU dan hasil muktamar NU di Lirboyo menyatakan bahwa NU tetap mendukung PKB, akan tetapi warga NU tidak harus memilih PKB, mereka (warga NU) bebas memilih partai mana saja meskipun kita (PKB) mengharapkan warga NU tetap memilih PKB sebagai wadah aspirasi politik warga NU.

Selama ini pola pendidikan yang dilakukan selain melalui pertemuan di organisasi-organisasi NU, juga melalui kegiatan internal partai seperti serap aspirasi di kantor DPC (tingkat kabupaten) dan juga dilakukan di DPAC (tingkat kecamatan). Namun pertemuan-pertemuan yang selama ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat di nilai kurang memberikan pengaruh kepada masyarakat, karena dalam melakukan pertemuan tersebut pihak partai hanya mengundang perwakilan dari masyarakat (konstituen) dan terkesan tertutup sehingga tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan yang dilakukan kurang efektif.

Ketidakefektifan pendidikan yang dilakukan juga dikarena metode komunikasi yang kurang tepat. Pada umumnya pendidikan politik yang dilakukan tidak dengan metode komunikasi dua arah, melainkan metode komunikasi satu arah dari komunikator (partai) kepada penerima pesan (masyarakat) dan cenderung *Top down* yang berarti pemaksaan stimulus yang sama sekali tidak menjamin kesesuaiannya dengan masyarakat, komunikasi totalitarianis. Pola komunikasi satu

arah yang dilakukan tidak memberi pengaruh terhadap kecerdasan masyarakat, justru yang terjadi adalah sebuah pemaksaan stimulus yang sama sekali tidak menjamin kesesuaiannya dengan masyarakat, karena dalam hal ini tidak terjadi proses dialog antara komunikator dengan penerima pesan.

Akan tetapi tidak seluruh kegiatan yang dilakukan PKB bersifat komunikasi satu arah dan mendikte, ada beberapa kegiatan pendidikan politik yang komunikatif seperti dalam kegiatan serap aspirasi. Namun dalam serap aspirasi ini hanya dilakukan ketika DPRD memasuki masa reses dan dilakukan di kantor-kantor PKB seperti DPC dan DPAC sehingga terkesan hanya untuk kalangan kader dan pengurus PKB. Selain serap aspirasi kegiatan lain adalah kegiatan diskusi tentang isu-isu politik dalam "Ngaji politik isu-isu strategis daerah dan nasional" secara berkala, yang dilakukan di organisasi kepemudaan yang ada di NU.

Berdasarkan bentuk pendidikan politik yang demikian, Syafi' AM., S.H. mengatakan bahwa masyarakat Gresik telah cerdas dalam menentukan pilihan politiknya karena mereka memilih itu tentunya melihat siapa calon anggota legislatifnya, caleg yang memberi perhatian dan peduli terhadap masyarakat itulah yang mereka pilih. Tetapi fakta yang diperoleh dari lapangan menunjukkan kecerdasan yang dimaksud bukan pengetahuan masyarakat tentang figur calon anggota legislatif, calon bupati, atau calon gubernur, sehingga calon tersebut menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat cenderung memilih figur yang mereka kenal seperti tokoh agama, walaupun masyarakat tidak mengetahui visi misi

dari partai politik maupun dari calon yang dipilih. Pola pendidikan politik yang selama ini lebih pada pemanfaatan NU sebagai alat sosialisasi politik dan tidak memberi pencerahan politik terhadap masyarakat, dan hal ini membuat PKB semakin dominan. Hal ini juga ditunjang dengan kultur masyarakat Gresik yang mayoritas warga nahdliyin yang selalu memilih partai ataupun calon yang dipilih pemimpinnya, apalagi ditunjang dalam setiap kegiatan dari NU senantiasa diselipkan kampanye kepada warga NU untuk memilih calon dari dan yang didukung oleh NU, sehingga praktek demokrasi yang ada dihiasi oleh politik patronklien.

Hubungan patron klien dijelaskan (Palras, 1971:1) sebagai sebuah hubungan yang tidak setara, yang terjalin antara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya, dan hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya (<http://roedijambi.wordpress.com/2010/01/27/mengenal-hubungan-patron-klien/>, diakses tanggal 7 Februari 2013).

Saat ini di kabupaten Gresik masih banyak terjadi praktek *money politic* dan *golput*. Menurut Sahlan dan Marwan (2012: 220) *golput* sudah menjadi semacam ideologi yang ingin diakui eksistensinya. Itu semua disebabkan rasa kecewa kepada parpol yang semakin tidak *capable*. Jelas partai politik memiliki andil dalam melahirkan *golput*, banyak parpol yang lahir atau dilahirkan tidak dilandasi dengan

idealisme yang jelas, perpol berdiri hanya atas nama demokrasi sehingga masyarakat bebas untuk mendirikan partai.

Selain itu juga terdapat perbedaan antara simpatisan partai sekarang dengan simpatisan partai zaman dahulu. Zaman sekarang simpatisan bergerak jika diberikan uang sedangkan zaman dahulu simpatisan bergerak karena sebuah ideologi. Hal ini diakibatkan oleh suasana demokrasi yang belum sabill, karena demokrasi lahir seperti dipaksakan. Dan diperburuk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjebak alam hal-hal teknik dalam menyelenggarakan pemilu begitu pula dengan partai politik dalam memberikan pendidikan politiknya hanya mempunyai pemikiran "asal menang" tanpa memikirkan pemberian pendidikan politik bagi warga (Sahlan dan Marwan, 2012: 222).

Kedua pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari pengakuan Moh. Syafi' AM., S.H. selaku ketua Fraksi PKB di DPRD Gresik, Dr. Ainul Rofiq, MM., selaku wakil Ketua DPC PKB kabupaten Gresik bahwa masih banyak praktek *money politic* dan *golput* yang terjadi di Kabupaten Gresik. Dengan adanya *money politic* yang dilakukan oleh politisi hanya demi kekuasaan, sehingga mendidik masyarakat menjadi pragmatis. Masyarakat akan mempunyai sifat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek daripada jangka panjang.

Money politic yang terjadi selama ini di masyarakat, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan politik yang ada. Menurut bapak Rofiq, *money politic* sangat berkaitan dengan pendidikan politik yang ada, karena dengan adanya pendidikan

politik diharapkan bagaimana caranya agar konsep masyarakat uang tidak menjadi yang utama meskipun uang tetap dibutuhkan. Saat ini dimasyarakat dalam memilih didasari dengan calon yang memberi uang, ini menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan politik di masyarakat masih rendah. Sedangkan pelaku *money politic* sendiri memang dilakukan oleh beberapa politisi untuk meraih suara, para politisi ini sebenarnya memahami betul akan pendidikan politik, akan tetapi karena faktor moralitas yang dimiliki para pelaku *money politic* tersebut, serta mental yang tidak siap untuk kalah sehingga mereka memilih jalan pintas.

Pendidikan politik untuk saat ini idealnya dihadapkan pada pendidikan moral berbasis keagamaan, sehingga yang berusaha dibangun adalah politik yang bersih. Ketiadaan akan hal ini mengakibatkan masyarakat, yang melihat bahwa politik itu kotor akan mengambil jalan pintas dengan *money politic* sebagai partisipasi politiknya.

Sedangkan dengan masalah *golput*, beliau menjelaskan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi sikap pemilih untuk *golput*. Faktor pertama, bisa karena sikap acuh tak acuh terhadap politik yang telah ada. Kedua bisa karena rasa kesal dan wujud perlawanan mungkin karena tujuan dan kepentingan politik yang diharapkan tidak terpenuhi. Selain itu juga bisa karena kesadaran demokrasinya yang kurang sehingga lebih mementingkan diri sendiri, misalnya ketika pada waktu pemilihan dilakukan masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada menyempatkan untuk menggunakan hak pilihnya.

Antara pendidikan politik dengan *money politic* dan *golput*, memiliki hubungan saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh Sahlan dan Marwan (2012: 225-226) *golput* bisa muncul karena dua faktor, yaitu pertama, kurang maksimalnya kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikannya. Kedua, pendidikan yang diberikan oleh para politisi terhadap konstituen menggunakan strategi yang salah yaitu strategi yang pragmatis. Para politisi masih memberatkan pada kepentingan individu daripada kepentingan umum. Terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh para politisi hanya demi meraih kekuasaan, politik uang cenderung mendidik masyarakat bersikap pragmatis. Masyarakat akan mempunyai sifat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek daripada jangka panjang.

Jika politik uang yang masih dianut maka akan berimbas pada perjuangan yang akan dilaksanakan oleh wakil rakyat yang terpilih. Wakil rakyat yang terpilih akan mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat kampanye daripada kebutuhan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi bisa membuat masyarakat bersikap *skeptis* terhadap pemilu, karena kekecewaan masyarakat sehingga masyarakat cenderung memilih *golput*.

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan masyarakat untuk lebih sadar akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran tersebut diharapkan agar mereka dapat menggunakan hak pilih dengan

baik bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Tidak adanya *reward and punishmen* serta kontrol dari lembaga pemerintahan terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, membuat partai politik kurang memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat juga tidak sebagaimana seharusnya, pendidikan yang diberikan tidak bersifat mencerdaskan sama sekali, kerap kali pendidikan yang dilakukan masih sebatas pada promosi calon dan partai politik. Padahal dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, dalam pasal 31 telah disebutkan dasar dan sasaran tujuan bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Reward and punishmen tersebut dapat dibuat seperti perankingan terhadap kinerja dari partai politik yang ada. Kemudian hasil penilaian disebarluaskan kepada publik, sehingga publik dapat menilai mana partai politik yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik mana yang tidak menjalankan peran dan fungsinya, yang nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pada waktu berikutnya.

Dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Secara umum faktor yang mendorong pelaksanaan pendidikan politik dari partai politik

kepada masyarakat adalah respon atau tanggapan masyarakat yang cukup baik terhadap keberadaan partai politik juga keberadaan anggota dewan. Masyarakat cukup senang, cukup respon terhadap anggota DPRD karena masyarakat masih banyak berharap dengan anggota dewan sebagai wakil mereka. Selain itu juga dengan datangnya para tokoh dari NU dan PKB merupakan modal yang sangat kuat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Namun selain dari faktor pendorong, dalam memberikan politik kepada masyarakat partai politik juga menemui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Faktor dominan yang menjadi penghambat adalah masalah pendanaan. Kurangnya dana yang dimiliki PKB membuat pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, sehingga partai tidak bisa melakukan pendidikan politik secara *intens* dan menyeluruh ke seluruh wilayah di kabupaten Gresik. Masalah pendanaan menjadi faktor utama, hal ini karena untuk mendatangkan tokoh-tokoh baik tokoh PKB maupun tokoh NU itu membutuhkan dana, selain itu juga untuk mendatangkan masyarakat juga membutuhkan dana minimal untuk konsumsi, praktis setiap kegiatan pertemuan senantiasa membutuhkan dana.

Pemerintah tidak menutup mata tentang masalah dana yang menjadi masalah utama bagi semua partai politik, termasuk bagi PKB. Sejatinya partai politik mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah melalui Banpol (Bantuan Politik) bagi partai

politik yang mampu memperoleh kursi di DPRD. Akan tetapi bantuan sejumlah Rp. 161.693.100,00 tersebut masih dirasa kurang oleh DPC PKB Kabupaten Gresik, karena bantuan yang diterima partai politik melalui Banpol tersebut sifatnya menyeluruh untuk semua kegiatan partai politik, bukan ditujukan untuk kegiatan pendidikan politik semata.

Faktor penghambat lainnya selain pendanaan adalah terbatasnya waktu yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Gresik. Masih minimnya kesempatan untuk bertemu secara keseluruhan itu memang menjadi kendala. Faktor teknisnya karena waktu yang tidak cukup leluasa karena reses (DPRD) hanya 6 hari kerja sehingga kurang lama, dibanding dengan DPR RI yang masa resesnya hampir 1 bulan. Ketergantungan partai politik terhadap anggota DPRD dalam melakukan pendidikan politik inilah yang menyebabkan pendidikan politik hanya dilakukan ketika para anggota dewan memasuki masa reses. Adanya isu-isu negatif tentang partai maupun anggota dewan, seperti korupsi yang dilakukan DPRD. Seakan seluruh anggota DPRD dan partai politik itu korupsi dan cenderung negatif di mata masyarakat. Hal ini juga menjadi faktor penghambat bagi partai untuk melaksanakan pendidikan politik secara maksimal.

V. PENUTUP

Simpulan

Pendidikan politik di PKB merupakan prioritas utama, akan tetapi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum masih berorientasi pada pencitraan partai politik.

Metode dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat

kurang efektif, karena tipe komunikasi yang digunakan adalah komunikasi satu arah. Selain itu dalam melaksanakan pendidikan politik tidak dilakukan secara umum, yakni dengan menggunakan sistem undangan. Sehingga masih terkesan tertutup untuk internal partai. Meskipun kerap kali pendidikan politik yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui kegiatan organisasi dari NU dengan mendatangkan politisi dari PKB, namun sayangnya pendidikan semacam ini hanya dilakukan untuk warga NU.

Materi yang diberikan kepada masyarakat dalam pendidikan politik adalah tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang pemerintahan baik pemerintahan desa maupun pemerintahan secara umum, dan juga tentang kedewanan (DPRD).

Faktor yang mendorong pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat adalah respon atau tanggapan masyarakat yang cukup baik terhadap keberadaan partai politik juga keberadaan anggota dewan. Selain itu juga dengan datangnya para tokoh dari NU dan PKB untuk memberikan pendidikan politik merupakan modal yang sangat kuat dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Faktor penghambat adalah masalah pendanaan. Faktor penghambat lainnya juga karena minimnya waktu yang dimiliki anggota dewan untuk melakukan pendidikan politik, sehingga praktis pendidikan politik dapat dilakukan ketika reses dan menjelang pemilu.

Saran

Perlu dibentuknya peraturan yang tegas terkait dengan sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan pendidikan politik terhadap masyarakat. Sehingga partai politik lebih memperhatikan pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Tanpa adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut membuat partai politik dalam melakukan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat terkesan seadanya.

Perlu adanya perubahan dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, minimal dengan berpedoman pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dalam UU tersebut dijelaskan tentang pokok materi, sasaran dan tujuan dari pendidikan politik, karena selama ini partai tidak melakukan pendidikan politik yang sesuai dengan UU yang ada.

Perlu adanya sistem/model baru yang komunikatif bagi partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat akan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara bisa lebih baik lagi.

Intensitas pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat masih sangat kurang, sehingga perlu peningkatan intensitas bagi parpol untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Bantuan politik yang ada seharusnya difokuskan pada pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga penggunaan Banpol jelas, dan pelaksanaan pendidikan politik dapat berjalan maksimal tanpa ada masalah dalam pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2011. *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi kedua. Jakarta: PT Gramedia.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Darussalam dan Syaiful Bari (Penyunting). 2011. *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta : DPP PKB.
- Fahrudin. 2009. Mengenal Hubungan Patron-Klien. (Online). (<http://roedijambi.wordpress.com/2010/01/27/mengenal-hubungan-patron-klien/>) diakses pada 7 Februari 2013.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik Konomikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Buku Obor Indonesia
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitaf*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nimmo, Dan. 2005. *KOMUNIKASI POLITIK Komunikasi, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2006. *KOMUNIKASI POLITIK Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowa, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sahlan, Sartono dan Awaludin, Marwan. 2012. *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Siregar, Ardian Ansari. 2009. Pengkaderan Pada Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara). *Skripsi* tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Suliadi. 2011. Peran DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *Skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: JPMP-KN FIS Unesa.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tawakkal, George Towar Ikkal. 2009. *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih (Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009)*, (Online), (eprints. undip.ac.id/24294/1/GEORGE_TOWAR_IKBAL_TAWAKKAL.pdf), diakses pada 7 Februari 2013.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (www.hukumonline.com), diakses pada 7 Februari 2013.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (www.hukumonline.com), diakses pada 7 Februari 2013.
- Yusro, As ' Adul. 2005. Partai Politik dan Penguatan Masyarakat Sipil. *Skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: Jurusan Jiniyah Siyash Fakultas Syari'ah Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.